



## Peran Pemerintah dalam Ekosistem Startup Sosial : Kajian Ekonomi Publik terhadap Insentif dan Hambatan Fiskal

Bagas Saputra <sup>1\*</sup>, Jauzari Helmi <sup>2</sup>, M. Rizky Indrawan Saputra <sup>3</sup>, W Pangestoeti <sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Dompok Tanjungpinang Tel.082253722586, Provinsi Kepulauan Riau 29124, Indonesia

Korespondensi penulis: [bagashsksh@gmail.com](mailto:bagashsksh@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [jzrhelmy@gmail.com](mailto:jzrhelmy@gmail.com) <sup>2</sup>, [rizky.indrawan.sya@gmail.com](mailto:rizky.indrawan.sya@gmail.com) <sup>3</sup>, [wahjoepangestoeti@umrah.ac.id](mailto:wahjoepangestoeti@umrah.ac.id) <sup>4</sup>

**Abstract.** *This study examines the role of government in the social startup ecosystem in Indonesia, focusing on fiscal incentives and barriers. The rapid growth of startups has changed lifestyles, but many social startups face challenges due to inadequate government support and fiscal policies. This study uses a qualitative approach, analyzing secondary data from government documents and academic literature. Findings show that fiscal incentives, such as tax breaks, significantly increase operational capacity and innovation among social startups. However, complex regulations and high tax burdens remain substantial barriers. This study recommends policy reforms to create an enabling environment for social startups, contributing to inclusive and sustainable economic development.*

**Keywords:** *Role of Government, Social Startups, Fiscal Incentives*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji peran pemerintah dalam ekosistem startup sosial di Indonesia, dengan fokus pada insentif dan hambatan fiskal. Pertumbuhan startup yang pesat telah mengubah gaya hidup, namun banyak startup sosial menghadapi tantangan karena dukungan pemerintah dan kebijakan fiskal yang tidak memadai. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis data sekunder dari dokumen pemerintah dan literatur akademis. Temuan menunjukkan bahwa insentif fiskal, seperti pengurangan pajak, secara signifikan meningkatkan kapasitas operasional dan inovasi di antara startup sosial. Namun, regulasi yang kompleks dan beban pajak yang tinggi tetap menjadi hambatan yang substansial. Studi ini merekomendasikan reformasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi startup sosial, yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Insentif Fiskal, Peran Pemerintah, Startup Sosial

### 1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia perkembangan startup mengalami pertumbuhan yang pesat dalam dua dekade terakhir ini. Berbagai startup berhasil mengubah gaya hidup masyarakat melalui penawaran yang memudahkan. Sebagian besar pendiri startup adalah generasi milenial di bawah 40 tahun, sehingga model bisnis sangat diminati oleh kalangan muda. Serta, di era digital saat ini banyak startup yang muncul, namun hanya sedikit dari mereka yang dapat bertahan dan meraih keuntungan. Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam ekosistem bisnis teknologi, berkat semangat dan inovasi dari para pelaku startup, saat ini Indonesia berada di peringkat lima di dunia dengan 2.193 startup (Shiba, 2025).

Beberapa startup di Indonesia, seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak telah berhasil mencapai status unicorn dan decacorn, yang memberikan kontribusi besar terhadap

perekonomian nasional. Misalnya, merger antara Gojek dan Tokopedia yang membentuk Go To Group memberikan dampak signifikan termasuk penghematan hingga sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pertumbuhan pesat startup yang ada didukung oleh faktor-faktor seperti jumlah penduduk yang besar, kemajuan teknologi, serta dukungan kuat dari pemerintah dan investor yang memberikan injeksi modal besar. Startup-startup tersebut juga aktif dalam mengembangkan ekosistem digital dan mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, sehingga memperkuat peran mereka dalam perekonomian nasional (Nexdatacenter, 2021).

Di tengah kemajuan tersebut, startup sosial muncul sebagai elemen penting dalam ekosistem startup yang tidak hanya menargetkan keuntungan finansial, tetapi juga fokus pada penciptaan dampak sosial yang positif. Startup sosial menggunakan inovasi teknologi untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, inklusi keuangan, dan pendidikan. Namun, perkembangan startup sosial menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait hambatan fiskal dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung. Selain itu, kewirausahaan sosial di Indonesia juga menghadapi kendala dalam hal regulasi, seperti belum adanya badan hukum yang ideal dan pengakuan resmi, serta minimnya insentif dan dukungan dari pemerintah. Tantangan lain meliputi kesadaran masyarakat yang masih rendah, keterbatasan sumber daya manusia, dan masalah yang mempengaruhi kelangsungan usaha sosial tersebut (Burhan, 2022).

Peran pemerintah dalam ekosistem startup sosial sangat penting, terutama dalam menyediakan insentif fiskal seperti keringanan pajak, subsidi, dan kemudahan regulasi yang dapat mendorong pertumbuhan startup sosial. Namun, hambatan fiskal seperti pajak yang tinggi, regulasi yang rumit, dan sulitnya akses pendanaan masih menjadi tantangan yang menghambat inovasi dan ekspansi startup sosial. Oleh karena itu, kajian ekonomi publik tentang dampak kebijakan fiskal pemerintah terhadap ekosistem startup sosial sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan startup sosial yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam ekosistem startup sosial dari sudut pandang ekonomi masyarakat, terutama terkait insentif dan tantangan fiskal yang dihadapi oleh startup sosial di Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pengembangan startup sosial sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Teori Ekonomi Publik

Ekonomi publik merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang fokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, termasuk pemerintah dan negara. Istilah "publik" di sini merujuk pada hal-hal yang melibatkan banyak orang, berbeda dengan "privat" yang berhubungan dengan individu atau kelompok kecil. Dalam ranah ekonomi, publik ekonomi mengkaji cara pemerintah mengelola sumber daya dan mengatur aktivitas ekonomi masyarakat untuk kepentingan bersama. Berikut merupakan beberapa ruang lingkup ekonomi publik, yaitu (Ridwan & Nawir, 2021) :

1. Pengadaan dan penyediaan barang serta jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
2. Pengelolaan keuangan negara, yang meliputi penerimaan (pajak, retribusi, PNBPN) dan pengeluaran pemerintah
3. Kebijakan fiskal dan moneter
4. Peran pemerintah dalam menangani isu-isu ekonomi seperti kemiskinan dan inflasi
5. Efisiensi serta kegagalan pasar
6. Distribusi pendapatan dan upaya untuk meratakan kesejahteraan
7. Pengaturan eksternalitas dan perlindungan lingkungan
8. Interaksi antara sektor publik dan sektor swasta

Menurut Richard A. Musgrave yang merupakan seorang ahli di bidang ekonomi publik yang terkemuka, pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian, diantaranya ialah :

1. Stabilisasi, yaitu memelihara stabilitas perekonomian, termasuk upaya untuk menjaga tingkat kemiskinan pada tingkat yang rendah dan menjamin kestabilan harga.
2. Alokasi, yaitu mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, baik melalui cara langsung, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, maupun melalui cara tidak langsung, seperti penerapan pajak dan subsidi.
3. Distribusi, yaitu mendistribusikan hasil produksi masyarakat secara adil melalui kebijakan-kebijakan, termasuk transfer pembayaran dan program-program bantuan sosial.

### Ekosistem Startup Sosial

Istilah dari ekosistem startup merujuk kepada jaringan dinamis dari berbagai entitas individu, organisasi, dan sumber daya yang saling terhubung dan berkontribusi secara kolektif terhadap pembentukan dan pengembangan startup. Ekosistem ini mencakup berbagai peserta,

termasuk pengusaha, investor, penyedia layanan, lembaga pendidikan, organisasi penelitian, dan badan pemerintah. Masing-masing mempunyai peranyang penting dalam mendukung startup sepanjang siklus hidupnya, mulai dari ide hingga skala yang lebih besar dengan potensi untuk menjadi pemimpin industri. Fokus utama dari sistem ini adalah pada perusahaan rintisan itu sendiri, yang biasanya dikenal karena pendekatan inovatif mereka dalam menyelesaikan masalah dan memanfaatkan pelaung pasar (Kaplan, 2025).

Ekosistem startup sosial adalah lingkungan yang mendukung keberadaan dan pertumbuhan perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga fokus pada menciptakan perubahan positif dan memberikan dampak sosial yang berarti. Startup sosial adalah perusahaan yang dibentuk untuk menciptakan dampak sosial yang positif melalui model bisnisnya. Fokusnya bukan hanya pada keuntungan, tetapi juga pada penyelesaian masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan, manusia, dan akses di daerah terpencil (Rifda, 2022).

Ekosistem yang dibangun ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan startup sosial, sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan solusi inovatif yang efisien terhadap masalah sosial, meningkatkan kemampuan dan keahlian tim melalui pelatihan dan bimbingan, mengakses dana yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pengembangan, membangun jaringan kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki visi sosial yang sejalan, dan memberikan dampak sosial yang signifikan dan berkelanjutan pada masyarakat.

### **Insentif Fiskal dan Hambatan Pajak**

Insentif fiskal merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi bentuk yang diberikan pemerintah terhadap kinerja keuangan daerah. Kriteria dari alokasi insentif fiskal ini sendiri mencakup pengendalian inflasi daerah, penggunaan produk dalam negeri, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengurangan prevalensi stunting, dan percepatan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah. Melalui APBN, pemerintah pusat juga menyediakan dana insentif daerah yang dikenal dengan insentif fiskal ini. Dana ini diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja yang mencakup perbaikan dan pencapaian di bidang tata kelola keuangan, pelayanan umum, dan layanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional serta pelaksanaan kebijakan nasional (DJPb, 2024).

Hambatan pajak merujuk pada berbagai kesulitan atau keluhan yang mengganggu proses pemungutan pajak yang berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Hambatan pajak ini terdiri dari dua jenis utama, diantaranya sebagai berikut (Saerang et al., 2023) :

1. Perlawanan Pasif, perlawanan ini tidak muncul dari inisiatif langsung wajib pajak, melainkan disebabkan oleh kondisi yang menyulitkan mereka untuk pengumpulan pajak. Kesulitan tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti struktur ekonomi masyarakat, tingkat perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang berdampak pada kesadaran dan keinginan untuk membayar pajak, sistem pemungutan pajak yang rumit dan tidak tepat, sehingga menghambat pelaksanaannya, dan kurangnya edukasi serta penyuluhan mengenai pajak, lemahnya penegakan hukum dan adanya korupsi yang mengurangi kesadaran wajib pajak.
2. Perlawanan Aktif, perlawanan ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak. Bentuk perlawanan aktif ini diantaranya seperti penghindaran pajak yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang legal dan tidak melanggar hukum, serta evasive pajak yaitu upaya menghindari pajak melalui cara ilegal atau melanggar hukum, seperti penggelapan pajak.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengintegrasikan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis data sekunder untuk mengeksplorasi peran pemerintah dalam ekosistem startup sosial. Fokus utama penelitian terletak pada aspek ekonomi publik, khususnya terkait insentif dan hambatan fiskal yang dihadapi oleh startup sosial, tanpa melibatkan wawancara langsung. Dalam teknik pengumpulan data sekunder, informasi diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan kebijakan fiskal, lembaga penelitian publikasi, jurnal akademik, serta sumber data statistik yang relevan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai bentuk insentif fiskal yang diberikan serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh startup sosial dalam konteks ekonomi masyarakat. Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, dimana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis dan objektif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara kebijakan fiskal pemerintah dengan perkembangan ekosistem startup sosial. Selain itu, pendekatan normatif akan diterapkan dalam penelitian ini untuk merumuskan kebijakan fiskal yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi publik, serta untuk menilai efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan startup sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai interaksi antara kebijakan fiskal dan pengembangan startup sosial dalam konteks ekonomi yang lebih luas.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keinginan startup sosial. Insentif seperti pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) dan pembebasan pajak tertentu memungkinkan startup sosial untuk mengurangi biaya operasional, sehingga mereka dapat menginvestasikan lebih banyak dana dalam pengembangan produk, penelitian, dan ekspansi bisnis. Startup yang mendapatkan insentif ini mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 30%, sementara yang tidak menerima insentif hanya tumbuh sekitar 10%. Selain itu, insentif fiskal juga berkontribusi terhadap peningkatan tenaga kerja di startup sosial, mempercepat pencapaian profitabilitas, dan memperkuat posisi mereka dalam ekosistem inovasi. Sektor teknologi sosial dan fintech adalah yang paling diuntungkan dari kebijakan ini, terlihat dari pertumbuhan investasi dan jumlah startup baru di bidang tersebut. Namun penelitian juga menemukan beberapa kendala fiskal yang masih menghambat perkembangan startup sosial, seperti kompleksitas administrasi perpajakan, kurangnya pemahaman tentang regulasi pajak, dan birokrasi yang rumit. Banyak startup terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa konsultan pajak demi memenuhi kewajiban perpajakan, yang menambah beban finansial dan operasional mereka (Handayani et al., 2024).

Dari sudut pandang ekonomi publik, pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan insentif fiskal yang esensial untuk menciptakan ekosistem startup sosial yang sehat dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mengurangi risiko finansial yang dihadapi oleh startup sosial, mendorong inovasi dan investasi yang lebih besar di sektor ini. Insentif pajak, seperti pengurangan tarif PPh dan pembebasan pajak, terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas likuiditas serta pengembangan startup sosial (Ramadhanty, 2021). Namun, adanya hambatan fiskal menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih menyeluruh. Kompleksitas regulasi dan rendahnya pengetahuan perpajakan berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan startup sosial, yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur proses administrasi perpajakan dan meningkatkan sosialisasi serta pendidikan bagi pelaku startup agar mereka dapat memanfaatkan insentif dengan optimal.

Dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang lebih kompetitif dan fleksibel dapat menarik investasi yang lebih banyak dan mempercepat pertumbuhan startup. Singapura menawarkan pengurangan pajak selama beberapa tahun pertama bagi startup, memberikan mereka ruang untuk fokus pada inovasi tanpa beban fiskal yang berat. Selain itu, insentif fiskal yang ditujukan untuk startup sosial

harus mempertimbangkan karakteristik unik mereka, yaitu fokus pada dampak sosial di samping keuntungan finansial. Kebijakan fiskal perlu dirancang untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi kuantitatif, tetapi juga kualitas inovasi sosial yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. Pemerintah juga dapat mengintegrasikan insentif fiskal dengan pendampingan program dan pembangunan infrastruktur digital untuk memperkuat ekosistem startup sosial secara keseluruhan (WATAMPONE, 2024).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran pemerintah sangat penting dalam ekosistem startup sosial di Indonesia. Meskipun perkembangan startup sosial menunjukkan potensi yang besar untuk menciptakan dampak sosial yang positif, tantangan fiskal dan regulasi masih menjadi penghambat utama. Insentif fiskal yang diberikan, seperti pengurangan pajak dan subsidi, terbukti mampu mendorong pertumbuhan dan inovasi di sektor ini. Startup yang menerima insentif ini mengalami peningkatan pendapatan dan kapasitas operasional yang signifikan. Namun tantangan seperti kompleksitas administrasi perpajakan dan minimnya pemahaman tentang regulasi pajak masih mengancam keberlangsungan startup sosial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi proses perpajakan dan meningkatkan sosialisasi kepada pelaku startup. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekosistem startup sosial dapat tumbuh secara berkelanjutan, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah dapat terus memperbaiki kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan karakteristik unik startup sosial. Hal ini mencakup penyederhanaan proses administrasi perpajakan dan peningkatan edukasi bagi pelaku startup mengenai regulasi pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan program pendampingan yang terintegrasi dengan insentif fiskal untuk memastikan bahwa startup sosial dapat tumbuh dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekosistem startup sosial di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan inklusif.

## DAFTAR REFERENSI

- Burhan, F. A. (2022). *Cerita Lima Startup Bangun Bisnis Berdampak Sosial di Indonesia*. Artikel ini telah tayang di *Katadata.co.id* dengan judul “*Cerita Lima Startup Bangun Bisnis Berdampak Sosial di Indonesia*” ,

<https://katadata.co.id/digital/startup/623acd88c6a24/cerita-lima-st>.

DJPb, K. (2024). *Insentif Fiskal Pemerintah*. Klc2.Kemenkeu.Go.Id.

Handayani, R., Irawan, G. S., Ramadhani, R. V., Dwi, B., & Putri, A. (2024). Dampak insentif fiskal perpajakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2313–2319. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.835>

Kaplan, S. (2025). *Introduction to the Startup Ecosystem*. Soren Kaplan. [https://www.sorenkaplan.com/startup-ecosystem/#:~:text=Mendefinisikan Ekosistem Startup,pada penciptaan dan pertumbuhan startup](https://www.sorenkaplan.com/startup-ecosystem/#:~:text=Mendefinisikan%20Ekosistem%20Startup,pada%20penciptaan%20dan%20pertumbuhan%20startup).

Nexdatacenter. (2021). *Perkembangan Bisnis Startup di Indonesia*. Wwww.Nexdatacenter.Com. <https://www.nexdatacenter.com/id/perkembangan-bisnis-startup-di-indonesia/>

Ramadhanty, A. (2021). Analisis Perlakuan Dan Insentif Pajak Untuk Perusahaan Rintisan (Startup). *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1332>

Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). BUKU EKONOMI PUBLIK. In *Pustaka Pelajar* (Vol. 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBE TUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

Rifda. (2022). *Pengertian Bisnis Start Up, Karakteristik, Tipe, dan Predikat*. IZIN.CO.ID. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2022/12/09/pengertian-bisnis-start-up-karakteristik-tipe-dan-predikat/>

Saerang, E., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02), 483–493. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48548>

Shiba, N. (2025). *Sejarah Singkat Perkembangan Startup di Indonesia dan Faktor Pendukungnya*.

WATAMPONE, K. (2024). *Insentif Fiskal untuk Pengembangan Teknologi Hijau pada UMKM: Langkah Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3688-insentif-fiskal-untuk-pengembangan-teknologi-hijau-pada-umkm.html>